

## **Dinamika Masyarakat Eropa dan Globalisasi Politik: Perspektif Kajian Wilayah<sup>1</sup>**

Siswanto

### *Abstract*

*This paper is intended as an attempt to understand the dynamics of European society, related to the issue of globalization, in particular the issue of political globalization. Globalization in political issues in Europe caused to the Democratization of Eastern Europe. Before the wave of democratization, Eastern Europe is the Communist political order and after that into a liberal democracy. The problem is how to learn from the process of political globalization in the region properly. The approach used in this paper is the analysis of the facts and inter-disciplinary study. Achieved the result is an understanding that the event democratization in Eastern Europe is valuable lessons for the nations of the World and the conclusion is that occurred democratization in Eastern Europe should became the reference of the process of Indonesia reform.*

### **Pendahuluan**

Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Eropa merupakan pelopor peradaban dan Ilmu Pengetahuan. Khususnya masyarakat Yunani kuno, mereka merupakan sekumpulan manusia yang melahirkan filsuf-filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, dan Sokrates. Mereka mewariskan peradaban agung yang sampai sekarang hal itu masih relevan dan mewarnai kehidupan manusia. Mereka telah meletakkan dasar-dasar tatanan pemerintahan yang benar dan sains yang menyejahterakan manusia.

Selain dari itu, masyarakat Eropa juga pernah mengalami periode Pencerahan atau *Aufklärung* yang merubah total kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, semula mereka didominaasi oleh kekuasaan, doktrin-doktrin agama, mitos-mitos masyarakat, lalu dengan datangnya era reformasi kemudian dibimbing oleh pandangan-pandangan ilmu pengetahuan dan rasio yang cerdas.

Akibat tumbuhnya ilmu pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan ekonomi khususnya sektor industri selanjutnya, Eropa mengalami Revolusi Industri yang telah merubah wajah kehidupan ekonomi dan sosial di sana.

1 Makalah ini disampaikan pada Seminar IHT PSDR-LIPI, Globalisasi ditinjau dari Kajian Wilayah, tanggal 5 Agustus 2010

Proses produksi dan transportasi yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan berubah menggunakan tenaga mesin. Akibat perubahan dalam faktor produksi ini, efisiensi dan jumlah produksi mengalami peningkatan secara signifikan.

Sekarang Eropa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang disegani walaupun baru-baru ini mengalami keguncangan yang hebat. Setidaknya terdapat segi-tiga kekuatan ekonomi internasional, yaitu AS, Jepang, dan Uni Eropa. Tiga pilar ekonomi ini mendominasi tata ekonomi internasional. Namun demikian, terdapat kekuatan ekonomi pengimbang, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina. Salah satu indikator kuatnya ekonomi Eropa adalah kuatnya mata uang Euro. Mata uang ini merupakan alat pembayaran yang cukup kuat nilainya, walaupun sempat mengalami guncangan akibat krisis ekonomi yang melanda Eropa khususnya Spanyol. Keberadaan negara-negara Eropa juga memiliki posisi yang kuat atau memiliki *power* yang besar dalam forum WTO. Akibatnya, Eropa menentukan arah perdagangan dunia baik yang menyangkut tarif maupun pasar bebas.

Selanjutnya, Uni Eropa (UE) sebagai kekuatan politik yang berpengaruh di dunia. UE adalah negara-negara berdaulat yang berintegrasi karena adanya kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini pertama diwacanakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada tanggal 9 Mei 1950 yang mengkhawatirkan terulangnya perang yang memporakporandakan Eropa (Perang Dunia ke-2). Wacana ini mendapat dukungan negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman, Italia, Belanda, Belanda, Luksemburg. Realisasi dari gagasan ini adalah terbentuknya masyarakat batu bara dan baja Eropa sebagai cikal bakal UE pada tahun 1951 di Paris. UE dan AS dewasa ini boleh dibilang mengontrol sistem internasional Pasca Perang Dingin. Kita menyaksikan berbagai persoalan di dunia melibatkan peran kekuatan negara-negara Eropa atau UE untuk mencapai penyelesaian. Misalnya saja penyelesaian konflik Timur Tengah melibatkan kekuatan Eropa disamping kekuatan AS dan Rusia. Pendeknya Eropa menjadi mitra AS dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Sementara itu, globalisasi diartikan sebagai pergerakan masyarakat, barang, jasa, informasi, dan ide yang melampau batas-batas negara. (Hodson: 1978,102) Globalisasi secara tidak langsung mengurangi sekat-sekat antar negara. Berbagai unsur-unsur di atas bergerak dari suatu negara ke negara lain secara bebas dan cepat khususnya informasi. Segala bentuk informasi mudah merambah dari negara ke negara lain. Jadi, suatu kejadian yang terjadi di suatu negara dengan cepat diketahui di negara lain. Bahkan, efeknya dapat dirasakan di negara lain. Seolah-olah bumi menjadi sempit. Penduduknya merupakan suatu kesatuan yang saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain.

Globalisasi suatu fenomena yang luas, namun dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, globalisasi dibidang ekonomi bisa dilihat dalam isu perdagangan bebas. Rezim perdagangan dunia WTO membicarakan soal kebijakan perdagangan internasional, khususnya perdagangan bebas. Produk barang dan jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tanpa memperoleh hambatan baik tarif maupun non-tarif. Globalisasi dibidang politik dan ideologi bisa dipahami dari berkembang isu demokratisasi dan hak asasi manusia. Semangat demokratisasi yang terjadi disuatu kawasan bisa menular ke kawasan lain. Isu demokratisasi di Eropa Timur dan Tengah (ETT) menumbangkan rejim komunis yang otoriter satu demi satu. Globalisasi dibidang budaya bisa dikaitkan dengan gaya hidup yang ada di suatu kawasan diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan lain. Misalnya budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain. Hal ini bisa dilihat dari maraknya masyarakat menikmati McDonald, Coca Cola, Kintucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya *Blue Jeans* yang disukai kaum muda AS seperti Levi's juga disenangi oleh masyarakat di negara lain.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami dinamika masyarakat Eropa yang terkait dengan isu global dalam hal ini demokratisasi dilihat dari perspektif Kajian Wilayah. Respon masyarakat Eropa terhadap isu-isu dalam konteks global tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain atau guna mengambil hikmahnya. Segi-segi positif dari masyarakat di negara-negara Eropa bisa menjadi teladan bagi negara lain seperti Indonesia, sebaliknya segi-segi negatifnya justru menjadi peringatan untuk dapat dihindari. Hal penting agar aspek negatif itu tidak terjadi pada negara kita. Pengalaman negara lain menjadi penting sejauh dapat memanfaatkannya dengan baik sebagai cermin untuk memperbaiki keadaan.

Eropa sebagai kekuatan dunia yang sangat berpengaruh sehingga beberapa permasalahan yang melanda kawasan itu perlu dipahami khususnya dalam konteks globalisasi dalam bidang politik. Dipenghujung abad ke-20, masyarakat dunia dikejutkan oleh merambatnya demokratisasi ke ETT yang datangnya justru bukan dari Eropa Barat yang terkenal sebagai pelopor demokrasi, tetapi dari Uni Soviet atau Rusia yang sebelumnya dikenal sebagai pimpinan negara komunis dengan tatanan politik otoriternya. Sehubungan dengan hal itu, sebuah pertanyaan yang relevan untuk diajukan yaitu bagaimana sebenarnya masyarakat Eropa merespon munculnya isu demokratisasi?

### **Studi Wilayah Eropa**

Terlebih dahulu perlu dikemukakan yang dimaksud dengan studi wilayah dalam tulisan ini. Studi wilayah di sini adalah studi wilayah internasional atau studi kawasan internasional karena untuk membedakan studi kawasan

yang di kembangkan di dalam negeri. Misalnya, studi kawasan pedesaan, studi kawasan daerah terpencil, studi kawasan daerah tertinggal, dan studi kawasan daerah perbatasan yang belakangan ini ramai dilakukan, seperti studi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Timur, Papua, dan NTT.

Selanjutnya, studi wilayah disini diartikan atau didefinisikan sebagai usaha untuk mempelajari, meneliti, dan memahami suatu wilayah internasional secara mendalam dan bersungguh-sungguh (Alfian: 1980,1). Berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah yang diteliti itu perlu dipelajari secara cermat. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya meneliti dan memahami dari aspek politik saja, melainkan juga dari segi-segi lain seperti kebudayaan, ekonomi, sejarah, pendidikan, geografi, sosial, militer, penduduk, dan agama. Kehidupan masyarakat tersebut dipelajari secara komprehensif atau menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek saja dari kehidupan masyarakat tersebut. Dengan demikian, hasilnya adalah suatu hasil kajian atau laporan penelitian yang utuh.

Dalam hal ini, perkembangan studi wilayah internasional berhubungan erat dengan perkembangan ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam hal ini, studi wilayah internasional mendapat dukungan dari disiplin antropologi, sosiologi, ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi. Studi wilayah internasional menggunakan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Keberadaan studi wilayah internasional sebagai perspektif untuk memahami suatu kawasan menjadi semakin komprehensif dan tajam karena memanfaatkan alat bantu analisis dari ilmu sosial dan kemanusiaan. Studi wilayah semakin lama semakin berkembang menjadi suatu kajian yang memiliki arti penting dalam menjelaskan berbagai persoalan di berbagai wilayah.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kajian wilayah dapat dikatakan suatu studi yang bercirikan interdisiplin. Dalam pendekatan interdisiplin, masalah sosial didekati, dianalisis dan dikaji dari berbagai disiplin ilmu sosial dan kemanusiaan secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan (Sumaatmaja, 1980: 123). Masalah sosial yang kompleks tidak cukup memadai jika hanya dikaji dari satu disiplin ilmu saja. Pendekatan interdisiplin menjadi solusi alternatif yang bisa digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah kompleks yang timbul di masyarakat. Misalnya, dinamika masyarakat terkait dengan soal kemiskinan, pendidikan, pengangguran, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Studi wilayah Eropa adalah suatu kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di wilayah Eropa secara keseluruhan dan kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di negara-negara Eropa. Ketika suatu kajian dilakukan terhadap dinamika sosial di Eropa secara keseluruhan, objek materialnya atau objek telaaahnya adalah persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan Uni Eropa (UE). Pembicaraan soal wilayah Eropa adalah tidak realistis jika mengabaikan keberadaan UE sebagai institusi yang dominan di Eropa

bahkan di dunia. Sedangkan, suatu kajian yang difokuskan terhadap persoalan sosial di suatu negara Eropa maka objek materialnya adalah persoalan-persoalan di masyarakat dan kebijakan dari pemerintah negara tersebut. Kajian ini lebih sempit sifatnya karena diarahkan kepada persoalan-persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja. Dengan demikian, studi wilayah Eropa dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang timbul di kawasan Eropa (Kajian UE) dan isu-isu yang timbul di negara-negara Eropa.

### **Globalisasi Politik**

Ada beragam globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi, budaya, dan politik. Globalisasi politik terjadi ketika suatu isu politik berubah menjadi suatu gerakan politik yang menimbulkan pengaruh politik terhadap tatanan politik yang ada baik ditingkat regional maupun global. Pada dekade 1990-an, Di Eropa sempat terjadi globalisasi politik, yaitu ketika gelombang demokratisasi melanda Eropa Tengah dan Timur (ETT) dan mendorong perubahan tatanan politik disana.

*Glasnost dan Perestroika* sebagai bola api yang liar. Terpilihnya Presiden Michael Gorbachev membawa perubahan tidak hanya di Rusia, namun di ETT. Seperti diketahui, ETT merupakan daerah pengaruh Rusia selama berlangsung Perang Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, dan Slovak penganut paham Komunisme. Namun demikian, Presiden Gorbachev melakukan program *Glasnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ini.

Fenomena ini dipahami sebagai gelombang demokratisasi yang menjatuhkan pemerintahan di ETT. Satu demi satu pemerintahan komunis di ETT tumbang karena mendapat tekanan dari rakyatnya yang menuntut pemerintahan demokratis. Disamping itu, Gorbachev juga mengisyaratkan perlu menerima aspirasi rakyat yang berkembang di ETT. Peralihan dari tatanan komunis kepada demokrasi secara umum tidak terlalu bergejolak, kecuali di Rumania. Pemerintah komunis yang berkuasa sendiri yang melakukan pembenahan internal untuk menuju tatanan demokrasi. Di lain pihak, rakyat menerima transformasi politik ini dengan baik pula sehingga tidak perlu jatuh korban yang terlampau banyak dalam transisi politik ini. Transisi politik ini umumnya terjadi antara tahun 1989 sampai dengan 1991.

Dalam kurun waktu waktu 3 tahun masyarakat yang tinggal di ETT telah merespon isu demokratisasi. Hal ini tidak terlepas dari aspek eksternal yaitu

Gorbachev memberi dukungan politik terhadap gelombang demokratisasi di wilayah ini. *Glasnost* dan *Perestroika* juga disebarakan ke kawasan ETT sebagai upaya mendorong gelombang demokratisasi. Berbagai negara ETT yang berada di bawah hegemoni Rusia mau tidak mau mengikuti garis kebijakan tersebut. Sedangkan aspek internalnya adalah perilaku politik masyarakat di ETT yang mendukung kebijakan transformasi politik tersebut secara realistis. Terkesan terjadi suatu kesepakatan politik antara penguasa dan rakyat di ETT, sehingga transisi politik dari tatanan otoriter menuju tatanan demokratis berjalan dengan aman.

Namun demikian, gelombang demokratisasi bukan berjalan tanpa masalah. Demokratisasi juga memiliki kendala-kendala yang menghambat demokratisasi itu sendiri. Di Rusia ide pembaruan mendapat penolakan dari masyarakat pendukung Komunisme. Mereka adalah kaum konservatif yang lebih menyukai tatanan Komunisme atau Marxisme-Leninisme tetap menjadi sistem politik di negaranya. Kekuatan masyarakat Rusia yang berpaham demikian jumlahnya cukup signifikan dan memiliki wakil di *Duma* yaitu Parlemen Rusia. Salah satu peristiwa yang cukup bersejarah ketika Gorbachev diculik dan dibawa keluar kota Moscow oleh sejumlah orang. Hal ini pasti ada kaitannya dengan kekuatan atau para pihak yang anti terhadap kebijakan-kebijakan politiknya atau pihak-pihak yang mengincar posisinya selaku pemimpin negara adidaya itu. Sampai akhirnya, Boris Yeltsin menemukan dirinya dan mengamankan atau membawanya kembali ke Moscow. Akhirnya, Yeltsin menggantikan dirinya dan meneruskan upaya pembaruan di negara itu.

Kebijakan Presiden Gorbachev membawa dampak signifikan dalam kehidupan politik Uni Soviet. Uni Soviet berubah menjadi sejumlah negara berdaulat, namun demikian Rusia menjadi pewaris utama negara adidaya itu. Negara-negara baru muncul seiring dengan bubarnya Uni Soviet, misalnya; Georgia, Ukraina, dan sejumlah negara Asia Tengah yang dahulu juga di bawah Soviet seperti Kazakstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan lainnya. Pola hubungan sesama bekas Uni Soviet ini sebagian bersifat konflik karena perebutan wilayah. Sedangkan hubungan, Rusia dengan bekas Uni Soviet sebagian juga bersifat konflik karena Rusia mendukung sejumlah gerakan-gerakan anti pemerintah di berbagai negara bekas Uni Soviet itu. Di samping itu, hal ini juga dipicu oleh masalah-masalah ekonomi.

Sedangkan, demokratisasi di ETT dihadapkan pada kekuatan lama yang berganti "baju baru." Seperti di ketahui, di ETT terjadi transformasi politik yang dilakukan oleh penguasa komunis sendiri. Partai Komunis yang berkuasa di ETT karena terjadi transformasi menyebut dirinya menjadi Partai Sosialis. Mereka memang mendukung terjadinya perubahan tatanan politik itu, namun demikian sikap-sikap konservatifnya belum sama sekali hilang. Akibatnya, sering terjadi konflik antara kekuatan konservatif yang terdiri dari

sisa-sisa Partai Komunis melawan kekuatan demokratis yang mencerminkan gerakan pembaruan.

Sisa-sisa kekuatan komunis masih eksis dalam kehidupan politik di ETT. Dalam suatu pemilu mereka memilih dan menyalurkan aspirasi kepada wakil-wakilnya. Dalam hal ini, mereka memiliki suara dan kekuatan politik, walaupun kekuatannya tidak sekuat saat sebelumnya. Ketika kekuatan politik pro-demokrasi gagal dalam pembangunan, keberadaan kekuatan komunis bukan mustahil menjadi menguat dan bisa mencuri perhatian masyarakat di ETT. Namun demikian, hal ini sebenarnya dipandang positif. Sejauh program-program mereka mencerminkan perubahan dan semangat demokrasi. Keberadaan sisa-sisa kekuatan komunis bisa menjadi penyeimbang kekuatan pro-demokrasi. Akibatnya, diantara kedua kekuatan terjadi saling kontrol dan koreksi yang menyempurnakan kekurangan-kekuarangan satu sama lain.

Bulgaria adalah salah satu negara di ETT yang mengalami transformasi politik. Transformasi di Bulgaria tidak terlepas dari sikap elit politik komunis yang berkuasa. Tudor Zhivkov seorang pemimpin Bulgaria yang memberi ruang kepada gelombang demokratisasi setelah berkuasa secara otoriter lebih dari 3 dekade. Gelombang demokratisasi telah mendorong Zhivkov mentolerir demonstrasi di Sofia, Ibukota Bulgaria. Zhivkov sebagai Sekjen Partai Komunis dan Ketua Dewan Negara mendominasi struktur politik di Bulgaria, namun akhirnya 10 November 1989 dia turun dari tampuk kepemimpinan di Bulgaria. Zhivkov dipandang sudah tidak lagi cocok dengan tuntutan rakyat Bulgaria yang menginginkan pemimpin yang lebih demokratis. Zhivkov menolak upaya demokratisasi yang tidak sejalan dengan Sosialisme sehingga menimbulkan ketidaksukaan rakyat kepada dirinya.

Selanjutnya, kepemimpinan Zhivkov dilanjutkan oleh Petur Mladenov. Mladenov sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri Bulgaria. Mladenov adalah pemimpin komunis yang mencoba menampung semangat demokratisasi rakyat Bulgaria. Mladenov antara lain membubarkan Polisi Rahasia Bulgaria pada 7 Februari 1990. Polisi Rahasia ini sering berhadapan dengan aktivitis atau para pemimpin demonstran. Kebijakan Madenov mendapat dukungan rakyat Bulgaria, bahkan juga mendapat pujian dari masyarakat internasional khususnya masyarakat Eropa. Langkah yang ditempuh Mladenov dengan membubarkan Polisi Rahasia ini dipandang sejalan dengan semangat demokratisasi yang melanda Eropa.

Namun demikian, Mladenov terjebak pada tindakan yang tidak demokratis. Dia membubarkan demonstrasi dengan paksa yaitu menggunakan Tank pada tanggal 18 Desember 1989. Hal ini direkam oleh video dan dijadikan barang bukti bahwa Mladenov tidak konsisten dengan semangat demokratisasi. Karena terbukti bersalah, Mladenov akhirnya pada 1 Agustus 1990 mengundurkan diri dan dia digantikan oleh Zheliu Zhelev pemimpin pertama di Bulgaria yang berasal bukan dari kalangan komunis. Dia adalah

pemimpin *the Union of Democratic Force* (UDF) yang menjadi salah satu kekuatan penting dalam transformasi di Bulgaria. *Grand National Assembly* mengangkat Zhelev menjadi Presiden Bulgaria, namun Wakil Presiden ialah Atanas Semerdjiev, seorang Jenderal dan tokoh dari kalangan komunis. Nampaknya, konfigurasi politik yang dibangun di era transisi adalah keseimbangan antara kekuatan pro-demokrasi dan komunis.

Selanjutnya, dari sisi ekonomi hal penting dari transformasi di Bulgaria adalah kebijakan privatisasi. Privatisasi di Bulgaria bisa dikatakan berjalan lambat. Kondisi ini terkait dengan sikap Partai Sosialis Bulgaria yang bersikap konservatif dalam soal kebijakan privatisasi tersebut. Konsekuensinya, ini kurang menarik minat para investor dalam dan luar negeri, lalu akibat lebih lanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Kebijakan privatisasi di Bulgaria mengarah kepada 1). Arah kebijakan privatisasi untuk perbaikan sektor pertanian, industri kecil, dan perumahan, 2). Sasaran privatisasi usaha kecil meliputi mini market dan pompa bensin, 3). Konsep yang dipakai dalam privatisasi adalah *one by one privatisation*. Privatisasi dilakukan dari perusahaan kecil, menengah, baru perusahaan besar. (Schwartz, 1995: 32). Dilain pihak, investor biasanya lebih tertarik kepada perusahaan-perusahaan menengah dan besar.

Program privatisasi di Bulgaria dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala-kendala itu, sebagai berikut:

(1). Masih kuatnya pengaruh komunis aatau kendala ideologis. Pad Pemilu 1990 Bulgaria Sosialis Party (BSP) mendapat 47 %, the Union Democratic Force (UDF) mendapat 36,20 % dan sisanya dibagi sejumlah partai. (Bell:1989,20) Dengan demikian, kekuatan kubu sosialis yang merupakan renkarnasi kekuatan komunis masih kuat di Parlemen. Konfigurasi politik ini menjadi kendala dalam program privatisasi karena sikap konservatif BSP.

(2). Produk hukum yang tidak kondusif untuk terlaksananya privatisasi atau disebut juga kendala struktural. Produk hukum yang mengatur soal privatisasi adalah dekret No. 56 tahun 1990 yang membatasi modal asing dalam perbankan di Bulgaria. Modal asing maksimal hanya boleh memiliki saham 50 % di perbankan Bulgaria. Undang-undang Privatisasi tahun 2003 (PPPC Act) juga hampir sama semangatnya dengan dekret tersebut yaitu penjualan saham disuatu perusahaan tidak boleh melebihi angka 50 %. Dengan demikian Pemerintah Bulgaria tidak ingin kehilangan kontrol atas peusahaan-perusahaan di disana sehingga terjadi pembatasan atas peran swasta di berbagai perusahaan. Hal ini membuat investor kurang berminat menanamkan modalnya di sektor perbankan.

Sementara itu, Tembok Berlin menjadi sasaran masyarakat pejuang demokrasi di Eropa. Tembok Berlin dipandang sebagai simbol dari komunisme. Dengan demikian, Tembok Berlin tidak disukai oleh rakyat Eropa khususnya

rakyat Jerman sehingga mereka terpancing untuk menjebolnya. Tembok itu mengingatkan masyarakat kepada kekejaman rejim komunis. Disamping itu, Tembok ini dinilai tidak relevan dengan semangat demokratisasi yang melanda Eropa.

Dari segi historis, Tembok Berlin dibangun tahun 1948 dan pembangunan ini dipandang sebagai awal terbelahnya Eropa secara ideologi. Pembangunan ini boleh dikatakan tanda dimulainya Perang Dingin di Eropa yang kemudian menjalar di berbagai kawasan di dunia. Perang antara komunisme melawan liberalisme. Rusia merasa berkepentingan menguasai Eropa Timur. Negara ini beralasan negara ini tidak ingin kembali mendapat serangan dari Jerman dikemudian hari karena sudah mendapat serangan Jerman sebanyak 2 kali. Kebijakan Rusia ini sebenarnya bertentangan dengan Konferensi Yalta 1945 yang menjanjikan masa depan kawasan ETT akan ditentukan oleh Pemilu yang demokratis. Namun kenyataannya, Jerman Timur dan negara ETT lainnya dijadikan daerah penyangga dari ekspansi Jerman.

Pembangunan Tembok Berlin bukan hanya pembagian atas wilayah Jerman, tetapi hal ini sebagai fenomena semakin menguatnya konflik antara AS dan Rusia.

Ketegangan politik antara AS dan Rusia sudah mulai terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Pemimpin kedua negara saling melontarkan pernyataan yang bernada perumusuan karena adanya saling tidak percaya diantara *The Big Three* (Rusia, AS, dan Inggris). Misalnya saja Stalin menyatakan bahwa dunia tidak akan damai sejauh tatanan ekonomi internasional dikuasai oleh Kapitalisme. Pernyataan ini memprovokasi pihak pemimpin AS. Sebaliknya, Presiden Truman meyakini bahwa demokrasi dan kebebasan akan terancam dengan semakin meluasnya ekspansi Komunisme. Pembangunan Tembok Berlin ini juga mencerminkan blokade Rusia terhadap masyarakat yang tinggal di Jerman Barat yang merupakan negara kalah perang dan menjadi daerah pengaruh AS dan sekutunya. Wajar saja AS dan sekutunya mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menembus blokade atau semacam embargo ekonomi kepada masyarakat di kawasan itu. AS dan sekutunya melakukan suplai kebutuhan pokok untuk masyarakat Jerman Barat. Upaya penerobosan blokade ini dilakukan dengan pengerahan pesawat udara untuk menerjunkan berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan di wilayah Jerman Barat.

Di lain pihak, Jerman Barat berada di bawah pengaruh AS. Jerman Barat menerapkan tatanan sosial-politik prinsip-prinsip demokrasi liberal. Jerman Barat menetapkan ibukota atau pusat pemerintahannya adalah Bonn. Dalam Perang Dingin, Jerman Barat merupakan bagian penting dari strategi militer AS. Di negara ini digelar sejumlah peluru kendali berhulu ledak nuklir. Jerman Barat bagian penting dari *Containment Policy* di Eropa yang tujuannya untuk mencegah meluasnya ekspansi Komunisme. Dalam rangka

melaksanakan *Containment Policy* ini AS dan sekutunya mengembangkan NATO dan *Marshall Plan*. NATO adalah aliansi militer AS dan negara-negara Eropa Barat, sedangkan *Marshall Plan* dukungan ekonomi AS kepada Eropa Barat yang hancur karena Perang Dunia ke-2.

Jebolnya tembok Berlin pada tahun 1989 sebagai simbol tumbangya Komunisme. Masyarakat di Jerman Timur maupun Jerman Barat menjebol Tembok Berlin sebagai upaya memerangi simbol-simbol komunisme di Jerman. Tembok Berlin dibangun atas keinginan Rusia yang menjadi simbol pemimpin komunis dunia. Di samping itu, masyarakat Jerman Barat juga ingin kembali bersatu dengan masyarakat Jerman Timur karena selama ini mereka dipisahkan oleh Tembok Berlin. Di era Perang Dingin Tembok Berlin dijaga dengan ketat oleh pasukan Jerman Timur. Hal ini untuk mencegah menyeberangnya warga Jerman Timur ke Jerman Barat karena kebutuhan ekonomi.

Dalam hal ini, pihak yang paling berkepentingan adalah warga Jerman Timur. Masyarakat di Jerman Timur kehilangan hak-haknya sebagai individu selama di bawah rejim komunis. Mereka memandang pendobrakan Tembok Berlin sebagai peluang untuk mengembalikan hak-hak individu baik hak politik maupun hak ekonomi. Mencari kehidupan yang lebih baik di Jerman Barat menjadi impian dari masyarakat Jerman Timur. Bantuan Pemerintah Jerman Barat untuk menata kehidupan mereka juga merupakan sesuatu dambaan. Warga Jerman Timur tentu juga berharap ingin hidup sejahtera seperti saudara-saudaranya yang tinggal di Jerman Barat. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang sangat berbeda antara kedua negara menjadi alasan penting untuk bergabung dengan Jerman Barat.

Masyarakat Eropa meyakini jebolnya Tembok Berlin sebagai kemenangan demokrasi atas tirani. Dalam tatanan komunis, individu tidak memiliki hak-hak politik secara bebas untuk disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa. Rakyat tidak bisa mengartikulasikan kepentingan politiknya. Disamping itu, individu-individu juga tidak memiliki hak untuk mengembangkan usaha-usaha dibidang ekonomi karena kewenangan pengelolaan sektor ekonomi baik barang maupun jasa berada ditangan pemerintah. Setelah Tembok Berlin jebol, masyarakat Berlin bebas menyampaikan aspirasi politiknya karena tatanan sosial-politiknya menjadi demokrasi. Selanjutnya, kendali sosial ekonomi berada ditangan Jerman Barat sehingga individu-individu dijamin untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan usahanya di Berlin. Pendeknya, sesudah jebolnya Tembok itu masyarakat Jerman Timur hidup dalam tatanan yang demokratis atau hidup dalam suasana bebas dari ketakutan.

### **Catatan Penutup: Mengkaji Eropa untuk Indonesia**

Studi wilayah Eropa adalah suatu kajian terhadap dinamika sosial yang

terjadi di wilayah Eropa secara keseluruhan dan kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di negara-negara Eropa. Ketika suatu kajian dilakukan terhadap dinamika sosial di Eropa secara keseluruhan, objek materialnya atau objek telaaahnya adalah persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan Uni Eropa (UE). Sedangkan, suatu kajian yang difokuskan terhadap persoalan sosial di suatu negara Eropa maka objek materialnya adalah persoalan-persoalan di masyarakat dan kebijakan dari pemerintah negara tersebut. Kajian ini lebih sempit sifatnya karena diarahkan kepada persoalan-persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja. Dengan demikian, studi wilayah Eropa dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang timbul di kawasan Eropa (Kajian UE) atau kajian makro dan isu-isu yang timbul di negara-negara Eropa atau kajian mikro dengan kata lain Kajian wilayah Eropa terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kajian institusional atau kelembagaan dan kajian negara.

Masyarakat Eropa menyikapi isu globalisasi politik atau isu demokratisasi dengan cepat dan berhasil. ETT yang tadinya berpaham komunis berubah menjadi demokratis. *Glasnost dan Perestroika* menjadi inspirasi dari demokratisasi di ETT. Terpilihnya Presiden Michael Gorbachev membawa perubahan tidak hanya di Rusia, namun juga di ETT. Seperti diketahui, ETT merupakan daerah pengaruh Rusia selama berlangsung Perang Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, dan Slovak penganut paham Komunisme. Namun demikian, Presiden Gorbachev melakukan program *Glasnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan atau demokratisasi ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ini dari komunis menjadi demokrasi. Suatu catatan, Uni Soviet atau Rusia yang mengkomunikasikan ETT, namun Rusia juga yang mendemokrasikannya. Namun demikian, peran rakyat di kawasan ini juga besar dalam demokratisasi itu

Demokratisasi di EET menjadi pembanding dari proses reformasi di Indonesia. Transformasi di ETT hampir sama dengan reformasi di Indonesia. Namun demikian, penegakan hukum di Bulgaria bagi mantan penguasa komunis yang bersalah sungguh-sungguh ditegakan. Misalnya saja Tudor Zhikov dipenjara selama 9 tahun. Padahal, Zhikov mantan orang nomor 1 (satu) di negaranya, namun tidak ada istilah diampuni atau dimaafkan. Sedangkan di Indonesia Presiden Soeharto dan keluarganya tidak mendapat sanksi hukum atas kesalahan-kesalahannya di waktu yang lalu. Oleh karena itu, Kelemahan dan kelebihan di reformasi di ETT menjadi bahan pelajaran yang berharga untuk menyempurnakan reformasi di Indonesia. ●

**Referensi**

- Alfian. 1990. *Permasalahan Studi Wilayah Internasional*. Lembaga Riset Kebudayaan Nasional-LIPI.
- Bell, John D. 1989. "Bulgaria" dalam Stephen White, *Handbook of Reconstruction in Eastern Europe and The Soviet Union*. London: Longman.
- Hodson, Joel. 2000. "Globalization and Nationalism in the United States: A Historical Perspective" dalam Leo Suryadinata (ed.). *Nationalism and Globalization*. Singapura: ISEAS.
- Sumaatmaja, Nursid. 1980. *Perspektif Studi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Schwartz, Gerd. 1995. "Privatization in Easter Europe" dalam Paul cook, Et.al *Privatization Policy and Performance*. Manchester: Prentice Hall.
- The European Union and Indonesia: Building Closer Relations*. Delegation of the European Commission. Jakarta.